

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.2, No.2, October 2018, pp. 383– 396

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.stiemtanjungredeb.ac.id/index.php/accountia>

PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BERAU

DJUPIANSYAH GANIE

djufstiem@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana penerapan SAP dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah dan bagaimana efek penerapannya terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten Berau. Penelitian ini menggunakan metode analisis data dengan pendekatan Partial Least Square (PLS). Pengaruh Implementasi SAP terhadap Variabel yang Relevan di LKPD Kabupaten Berau memiliki efek positif yang signifikan. Pengaruh Implementasi SAP terhadap Variabel Yang Dapat Diandalkan di LKPD Kabupaten Berau memiliki efek positif yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari nilai t-statistik yang lebih besar dari 2,131 yaitu 5,532. Dengan demikian, hipotesis H3 dalam penelitian ini diterima. Pengaruh Aplikasi SAP terhadap variabel yang Dapat Dipahami di Kabupaten Berau, LKPD memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap konstruksi yang dapat dibandingkan dengan LKPD Kabupaten Berau. Hal ini dapat dilihat dari nilai t-statistik yang lebih kecil dari 2,131 yaitu 1,689. Dengan demikian, hipotesis H4 dalam penelitian ini ditolak.

Kata Kunci: pelaporan keuangan, Aplikasi SAP

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.2, No.2, October 2018, pp. 383– 396

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.stiemtanjungredeb.ac.id/index.php/accountia>

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the extent of the application of SAP in local government financial reporting and how the effect of its application to the quality of financial reports on the local government of Berau Regency. This research uses data analysis method with Partial Least Square (PLS) approach. The Effect of SAP Implementation on Relevant Variables in LKPD Berau District has a significant positive effect. The Effect of SAP Implementation on Reliable Variables in LKPD Berau District has a significant positive effect. It can be seen from the t-statistic value which is greater than 2.131 which is 5.532. Thus, the H3 hypothesis in this study was accepted. The effect of SAP Application on Understandable variables in the Berau District LKPD has a significant positive effect on the construction can be compared to the Berau District LKPD. This can be seen from the t-statistic value which is smaller than 2.131 which is 1.689. Thus, the H4 hypothesis in this study was rejected.

Keywords: financial reporting, SAP applications

PENDAHULUAN

Dalam Era Reformasi ini semua Negara pasti membutuhkan pemerintah yang baik atau yang biasa disebut sebagai *Good Government Governence* di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dengan bergulirnya otonomi daerah yang merupakan reformasi hidup dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, kebijakan

pemerintah pusat dalam segelintir bidang diubah menjadi kebijakan daerah termasuk kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Arus reformasi tersebut juga berpengaruh terhadap semua bidang kehidupan, yang menjadi sorotan utama dalam penyelenggaraan reformasi adalah bidang birokrasi pemerintahan yang

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.2, No.2, October 2018, pp. 383– 396

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.stiemtanjungredeb.ac.id/index.php/accountia>

menuntut beragam pengelolaan tentang keuangan pemerintah yang baik.

Perubahan pengelolaan keuangan Negara masih terus dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini dimaksudkan agar amanat yang tertuang dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mengharuskan keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dapat semakin diwujudkan.

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat

maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 sebagai pengganti dari PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis kas. Penerapan PP Nomor 24 Tahun 2005 memang masih bersifat sementara, hal ini sesuai dengan amanat yang tertuang dalam pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan maka digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Sementara itu untuk pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual menurut pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 harus dilaksanakan

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.2, No.2, October 2018, pp. 383– 396

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.stiemtanjungredeb.ac.id/index.php/accountia>

selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Perubahan standar akuntansi pemerintahan menuju berbasis akrual akan membawa dampak kepada pengelolaan keuangan Negara.

Adanya penetapan PP Nomor 71 Tahun 2010 maka penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum. Hal ini berarti pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan standar akuntansi pemerintahan yang baru yaitu standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang harus dilaksanakan selambat-lambatnya tahun 2015. Hal ini sesuai dengan pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan hal ini ditegaskan dalam pasal 4 ayat (1) PP Nomor 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa pemerintah menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan prinsip – prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Maka dari itu, pemahaman aparatur atas penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010 memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel, yang memungkinkan para pemakai laporan keuangan untuk dapat mengakses informasi tentang hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.2, No.2, October 2018, pp. 383– 396

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.stiemtanjungredeb.ac.id/index.php/accountia>

pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai.

Menurut Harahap (2011:138) Tujuan laporan keuangan bagi lembaga pemerintah dan lembaga yang bukan bertujuan untuk mendapatkan laba adalah memberikan informasi yang berguna untuk menilai efektivitas dari manajemen dan sumber-sumber kekayaan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Karakteristik kualitatif tersebut merupakan syarat akan kualitas sebuah laporan keuangan,

diantaranya relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut M. Ramli Faud (2016:129) terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa keuangan yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar dan Pernyataan Menolak Memberi Opini. Opini WTP diberikan oleh auditor jika terjadi pembatasan dalam lingkup audit dan tidak terdapat pengecualian yang signifikan mengenai kewajaran dan penerapan prinsip akuntansi berterima umum dan penyusunan laporan keuangan, konsistensi penerapan prinsip akuntansi berterima umum tersebut, serta pengungkapan memadai dalam laporan keuangan. Opini WDP diberikan jika lingkup audit dibatasi oleh klien, auditor tidak dapat melaksanakan prosedur audit penting atau tidak dapat memperoleh informasi penting karena kondisi-kondisi yang

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.2, No.2, October 2018, pp. 383– 396

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.stiemtanjungredeb.ac.id/index.php/accountia>

berada diluar kekuasaan klien maupun auditor, laporan keuangan tidak disusun sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum, prinsip akuntansi berterima umum yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan tidak diterapkan secara konsisten. Opini tidak wajar diberikan jika laporan keuangan klien tidak disusun berdasarkan prinsip akuntansi berterima umum sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas. Auditor tidak memberi pendapat jika pembatasan yang luar biasa sifatnya terhadap lingkup audit dan auditor tidak independen dalam hubungannya dengan klien.

KAJIAN TEORI

Pengertian Akuntansi sendiri adalah menyangkut angka-angka yang akan dijadikan dasar dalam proses pengambilan keputusan, angka itu menyangkut uang atau nilai moneter yang menggambarkan catatan dari

transaksi perusahaan. Angka itu dapat dianalisis lebih lanjut untuk menggali lebih banyak informasi yang dikandungnya dan memprediksi masa yang akan datang, ia bersifat netral kepada semua pemakai laporan ada unsur seninya karena berbagai alternatif yang bisa dipilih melalui pertimbangan subjektif serta ia merupakan informasi yang sangat diperlukan para pemakai untuk pengambilan keputusan (Harahap, 2011:5).

Akuntansi Pemerintahan dapat diartikan sebagai bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya yang tidak bertujuan untuk mencari laba, sedangkan menurut International Federation of Accountants (IFAC), yang dimaksud dengan “sektor publik” (public sector) mengacu pada pemerintah pusat (national government), pemerintah daerah (regional government), misalnya propinsi, negara bagian, atau tetitorial, pemerintah lokal (local governments), misalnya kota (city,

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.2, No.2, October 2018, pp. 383– 396

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.stiemtanjungredeb.ac.id/index.php/accountia>

town) dan unit pemerintahan lain yang terkait, misalnya badan atau lembaga (Elsye, 2016:39)

Sedangkan menurut Muhammad Gade (1993:25) dalam Rosmery Elsy (2016:44), karakteristik akuntansi pemerintahan adalah sebagai berikut.

a. Menggunakan akuntansi dana (fund), “dana” disini adalah satuan akuntansi dan fiskal (fiscal and accounting entity) dengan seperangkat buku besar yang mencatat kas, sumber-sumber keuangan selain kas, kewajiban-kewajiban, sisa atau saldo modal beserta perubahan-perubahannya yang dipisahkan untuk melaksanakan kegiatan khusus atau mencapai kegiatan tertentu.

b. Tidak ada model atau disain tunggal untuk akuntansi pemerintahan, karena sangat dipengaruhi oleh peraturan dan hukum yang berlaku di negara tersebut, nilai budaya, tradisi dan faktor-faktor lainnya

Rosmery Elsy (2016:48) menuliskan komponen laporan keuangan pemerintah terdiri atas

laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports), laporan finansial dan CaLK. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri atas LRA dan Laporan Perubahan SAL. Laporan finansial terdiri atas Neraca, LO, LPE dan LAK. CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial

Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (PP Nomor 71 Tahun 2010)

METODE PENELITIAN

a. Data dikumpulkan melalui metode angket, yaitu menyebarkan daftar pertanyaan (kuisisioner) yang akan diisi secara obyektif oleh responden yang menjadi anggota sampel.

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.2, No.2, October 2018, pp. 383– 396

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.stiemtanjungredeb.ac.id/index.php/accountia>

- b. Wawancara, yaitu teknik mendapatkan data dengan mengadakan wawancara langsung dengan beberapa pihak yang berkompeten atau yang lebih mengetahui secara mendalam mengenai permasalahan dalam penelitian.
- c. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data melalui sumber-sumber dokumen atau arsip.
- d. Studi Kepustakaan, merupakan teknik pengumpulan data yang berorientasi pada sumber-sumber dan literatur, buku-buku yang mempunyai hubungan erat dengan penulisan skripsi ini dan dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang diteliti

Penelitian ini menggunakan metode analisis data dengan pendekatan Partial Least Square (PLS). PLS adalah model persamaan Struktural Equation Modeling (SEM) yang berbasis komponen atau varian.

Menurut Ghozali (2014) PLS merupakan pendekatan alternatif yang bergeser dari pendekatan SEM berbasis kovarian menjadi berbasis varian.

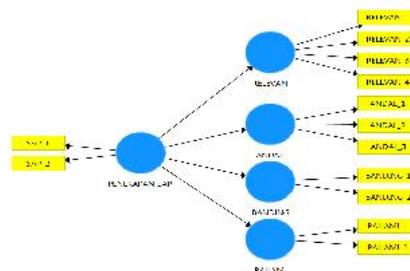
SEM yang berbasis kovarian umumnya menguji kausalitas/teori sedangkan PLS lebih bersifat predictive model. PLS merupakan metode analisis yang powerfull (Ghozali:2014) karena tidak didasarkan pada banyak asumsi. Misalnya, data harus terdistribusi normal, sampel tidak harus besar. Selain dapat digunakan untuk mengkonfirmasi teori, PLS juga dapat digunakan untuk menjelaskan ada tidaknya hubungan antar variabel laten. PLS dapat sekaligus menganalisis konstruk yang dibentuk dengan indikator reflektif dan formatif.

Menurut Ghozali (2014) tujuan PLS adalah membantu peneliti untuk tujuan prediksi. Model formalnya mendefinisikan variabel laten adalah linear agregat dari indikator-indikatornya. Weight estimate untuk menciptakan komponen skor variabel laten didapat berdasarkan bagaimana inner model (model struktural yang

menghubungkan antar variabel laten) dan outer model (model pengukuran yaitu hubungan antara indikator dengan konstraknya) dispesifikasi. Hasilnya adalah residual variance dari variabel dependen.

Variabel-variabel yang berbentuk lingkaran merupakan variabel laten yang terbagi menjadi variabel laten endogen (dependen) dan variabel laten eksogen (independent), dan variabel yang berbentuk kotak merupakan variabel manifest, yang digunakan sebagai indikator variabel laten yang akan diwujudkan menjadi pertanyaan-pertanyaan kepada responden dengan menggunakan skala likert.

Teknik pengolahan data dengan menggunakan metode SEM (Struktural Equation Modeling) berbasis Partial Least Squares (PLS) memerlukan beberapa tahap untuk menilai Fit model dari sebuah model penelitian (Ghozali, 2014)



Gambar 1. Kerangka Pikir

HIPOTESIS

Berdasarkan kerangka pikir yang telah dikemukakan, maka penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut:

1. H_1 : Diduga Penerapan SAP berpengaruh positif terhadap variabel Relevan pada LKPD Kabupaten Berau
2. H_2 : Diduga Penerapan SAP berpengaruh positif terhadap variabel Andal pada LKPD Kabupaten Berau
3. H_3 : Diduga Penerapan SAP berpengaruh positif terhadap variabel dapat dibandingkan pada LKPD Kabupaten Berau
4. H_4 : Diduga Penerapan SAP berpengaruh positif terhadap variabel dapat dipahami pada LKPD Kabupaten Berau

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.2, No.2, October 2018, pp. 383– 396

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.stiemtanjungredeb.ac.id/index.php/accountia>

HASIL PENELITIAN

masing-masing nilai t statistik dari pengaruh penerapan SAP terhadap masing-masing variabel yang merupakan karakteristik kualitatif dari kualitas laporan keuangan. Dimana pengujian hipotesisnya diuraikan sebagai berikut:

- a. Hipotesis 1: *Diduga Penerapan SAP berpengaruh signifikan positif terhadap variabel Relevan pada LKPD Kabupaten Berau*

Dari hasil pengolahan data yang ditampilkan pada gambar diatas diketahui bahwa nilai koefisien jalur penerapan SAP terhadap variabel Relevan sebesar 0,668 dengan nilai t -statistic sebesar 7,399 jika dibandingkan dengan nilai t tabel sebesar 2,131 maka t -statistic $>$ t tabel yang berarti hipotesis diterima.

- b. Hipotesis 2: *Diduga Penerapan SAP berpengaruh signifikan positif terhadap variabel Andal pada LKPD Kabupaten Berau*

Dari hasil pengolahan data yang ditampilkan pada gambar diatas diketahui bahwa nilai koefisien jalur penerapan SAP terhadap variabel Andal sebesar 0,613 dengan nilai t -statistic sebesar 5,532 jika dibandingkan dengan nilai t tabel sebesar 2,131

maka t -statistic $>$ t tabel yang berarti hipotesis diterima.

- c. Hipotesis 3: *Diduga Penerapan SAP berpengaruh signifikan positif terhadap variabel dapat dibandingkan pada LKPD Kabupaten Berau*

Dari hasil pengolahan data yang ditampilkan pada gambar diatas diketahui bahwa nilai koefisien jalur penerapan SAP terhadap variabel Dapat Dibandingkan sebesar 0,594 dengan nilai t -statistic sebesar 4,947 jika dibandingkan dengan nilai t tabel sebesar 2,131 maka t -statistic $>$ t tabel yang berarti hipotesis diterima.

- d. Hipotesis 4: *Diduga Penerapan SAP berpengaruh signifikan positif terhadap variabel dapat dipahami pada LKPD Kabupaten Berau*

Dari hasil pengolahan data yang ditampilkan pada gambar diatas diketahui bahwa nilai koefisien jalur penerapan SAP terhadap variabel Dapat Dipahami sebesar 0,342 dengan nilai t -statistic sebesar 1,689 jika dibandingkan dengan nilai t tabel sebesar 2,131 maka t -statistic $<$ t tabel yang berarti hipotesis ditolak.

Penerapan SAP mempengaruhi kualitas LKPD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Berau. Disamping itu terdapat faktor-faktor lain yang juga

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.2, No.2, October 2018, pp. 383– 396

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.stiemtanjungredeb.ac.id/index.php/accountia>

mempengaruhi kualitas sebuah LKPD. Tingkat kepapahan pembuat maupun pengguna terhadap suatu laporan keuangan sangat beragam, sehingganya sering terjadi perbedaan dalam memahami informasi-informasi yang disajikan dalam LKPD.

Pada penelitian ini dapat diketahui bahwa diantara keempat karakteristik kualitas laporan keuangan pemerintahan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami, yang paling dipengaruhi oleh penerapan SAP adalah variabel relevan yakni sebesar 44,6%, kemudian variabel andal sebesar 37,5%, dapat dibandingkan sebesar 35,3% dan yang paling rendah adalah variabel dapat dipahami yang hanya sebesar 11,7%

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Penerapan SAP terhadap Variabel Relevan pada LKPD Kabupaten Berau

Berdasarkan perhitungan statistik, dapat disimpulkan bahwa konstruks penerapan SAP berpengaruh signifikan positif terhadap konstruks relevan pada LKPD Kabupaten Berau. Hal ini dapat dilihat dari nilai *t-statistic* yang lebih besar dari 2,131 yakni sebesar 7,399. Dengan demikian, hipotesis H₁ dalam penelitian ini diterima. Hal ini menunjukkan bahwa jika SAP diterapkan maka

secara signifikan juga akan meningkatkan kerelevanan sebuah LKPD, yang dengan itu juga dapat meningkatkan kualitas LKPD.

2. Pengaruh Penerapan SAP terhadap Variabel Andal pada LKPD Kabupaten Berau

Berdasarkan perhitungan statistik, dapat disimpulkan bahwa konstruks penerapan SAP berpengaruh signifikan positif terhadap konstruks andal pada LKPD Kabupaten Berau. Hal ini dapat dilihat dari nilai *t-statistic* yang lebih besar dari 2,131 yakni sebesar 5,532. Dengan demikian, hipotesis H₂ dalam penelitian ini diterima. Hal ini menunjukkan bahwa jika SAP diterapkan maka secara signifikan juga akan meningkatkan keandalan sebuah LKPD, yang dengan itu juga dapat meningkatkan kualitas LKPD.

3. Pengaruh Penerapan SAP terhadap Variabel Dapat Dibandingkan pada LKPD Kabupaten Berau

Berdasarkan perhitungan statistik, dapat disimpulkan bahwa konstruks penerapan SAP berpengaruh signifikan positif terhadap konstruks dapat dibandingkan pada LKPD Kabupaten Berau. Hal ini dapat

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.2, No.2, October 2018, pp. 383– 396

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.stiemtanjungredeb.ac.id/index.php/accountia>

dilihat dari nilai *t-statistic* yang lebih besar dari 2,131 yakni sebesar 4,497. Dengan demikian, hipotesis H_3 dalam penelitian ini diterima. Hal ini menunjukkan bahwa jika SAP diterapkan maka secara signifikan juga akan meningkatkan kualitas sebuah LKPD, yang dengannya LKPD dapat dibandingkan dengan kejadian dimasa lalu dan dapat dibandingkan dengan entitas lain yang menerapkan kebijakan akauntansi yang sama.

4. Pengaruh Penerapan SAP terhadap variabel Dapat Dipahami pada LKPD Kabupaten Berau

Berdasarkan perhitungan statistik, dapat disimpulkan bahwa konstruksi penerapan SAP berpengaruh signifikan positif terhadap konstruksi dapat dibandingkan pada LKPD Kabupaten Berau. Hal ini dapat dilihat dari nilai *t-statistic* yang lebih kecil dari 2,131 yakni sebesar 1,689. Dengan demikian, hipotesis H_4 dalam penelitian ini ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan SAP di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Berau tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dapat dipahami.

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berpengaruh signifikan terhadap variabel relevan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Berau. Artinya penerapan SAP dapat meningkatkan kerelevanan suatu LKPD yang mana relevan termasuk dalam salah satu karakteristik kualitatif LKPD sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan.
2. Penerapan SAP berpengaruh signifikan terhadap variabel andal pada LKPD Kabupaten Berau. Artinya penerapan SAP dapat meningkatkan keandalan suatu LKPD yang mana andal termasuk dalam salah satu karakteristik kualitatif LKPD sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan.
3. Penerapan SAP berpengaruh signifikan terhadap variabel dapat dibandingkan pada LKPD Kabupaten Berau. Artinya penerapan SAP dapat meningkatkan kualitas LKPD

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.2, No.2, October 2018, pp. 383– 396

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.stiemtanjungredeb.ac.id/index.php/accountia>

sehingga dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya maupun dengan entitas yang menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

4. Penerapan SAP tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dapat dipahami pada LKPD Kabupaten Berau. Artinya penerapan SAP tidak begitu mempengaruhi tingkat kepahaman terhadap informasi yang disajikan dalam sebuah LKPD

SARAN

Dari kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran-saran sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Berau.

1. Disarankan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Berau terus meningkatkan kualitas laporan

keuangan dengan menerapkan SAP secara merata diseluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Berau.

2. Sebaiknya Pemerintah Daerah Kabupaten Berau mengadakan kembali sosialisai dan pelatihan mengenai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) guna meningkatkan dan menyeragamkan pemahaman tentang pengelolaan keuangan yang sesuai dengan SAP.
3. Untuk peneliti berikutnya disarankan menggunakan obyek penelitian tidak terbatas hanya pada Penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, namun dapat menambah variabel independen lain yang mungkin memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuanga

DAFTAR PUSTAKA

Adi Patra, Dahri, dkk. 2015. *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Palopo: Jurnal Akuntansi. Vol.02, No.01.

Faud, Ramli. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah,*

Cetakan Pertama. Ghalia Indonesia, Bogor.

Ghozali, Imam. 2014. *Structural Equation Modeling, Metode Alternatif Dengan Partial Least Squares (PLS)*, Edisi Keempat. Universitas Diponegoro, Semarang.

Handayani, Desi. 2012. *Good Governance dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.*

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.2, No.2, October 2018, pp. 383– 396

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.stiemtanjungredeb.ac.id/index.php/accountia>

- Riau: Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis. Vol.5.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2011. *Teori Akuntansi*, Edisi Revisi, Cetakan Kedua belas. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ihsanti, Emilda. 2014. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Lima Puluh Kota)*. Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang, Padang.
- Nordiawan, Deddi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*, Salemba Empat, Jakarta.
- Oktarina, Mia, dkk. 2016. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kota Semarang (Studi Kasus pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2014)*. Semarang: Jurnal Akuntansi. Volume 2, No.02.
- Pribadi, Arief. 2015. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung)*. Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Widyatama, Bandung.
- Puspita Sari, Winda. 2011. *Analisa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang*. Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas, Padang.
- Rosmery Elsy, Danang Suwanda, Umuh Muchidin. 2016. *Dasar-Dasar Akuntansi Akrual Pemerintah Daerah*, Cetakan Pertama. Ghalia Indonesia, Bogor.
- Sunyoto, Danang. 2011. *Metodologi Penelitian untuk Ekonomi: Alat Statistik dan Analisis Output Komputer*, Cetakan Pertama. CAPS, Yogyakarta.